



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA**



**KOTA PROBOLINGGO**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan HidayahNya semata, akhirnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 ini dapat kami susun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 ini telah tercermin dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan telah selesainya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 ini, kami berharap dapat menjadikan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas operasional Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 ini, oleh karenanya kami sangat berterimakasih atas saran dan kritik yang ada demi perbaikan di masa mendatang.

Probolinggo, 04 Oktober 2021

Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PTSP DAN TENAGA KERJA  
KOTA PROBOLINGGO



**RETNO WANDANSARI, S.Pt., MP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690420 199602 2 001

## 1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah ( RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah ) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun

Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Probolinggo.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan RENJA Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk didalamnya arah kebijakan fisik dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 dan pendanaannya menggunakan Renja K/L dan rancangan RKPD Provinsi sebagai bahan masukan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 );

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
- i. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 bermaksud untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

### **1.3.2.Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun prioritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022;
- b) Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022;
- c) Mengevaluasi / mereview hasil kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tahun sebelumnya;
- d) Mencari solusi / pemecahan masalah yang dihadapi pada tahun sebelumnya agar tidak terjadi di tahun yang akan datang;
- e) Sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dan tenaga kerja selama 1 (satu) tahun ke depan.

### **1.4 Sistematika Penyusunan**

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2022.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika penulisan

#### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun lalu**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2020;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

### BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2022

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan;

### BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

### BAB V Penutup

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Hasil evaluasi pelaksanaan renja memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tahun lalu ( tahun n-2 ) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n-1 ). Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian renstra sampai dengan 2020 sebagaimana pada tabel berikut:



Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi/Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%</b>	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	10					10	10	2,5
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	10					10	10	2,5
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100					100	100	25
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	100					100	100	25
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100					100	100	25
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	20					20	20	5
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Realisasi Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Yang Diadakan	200					200	200	50
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100					100	100	25
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah realisasi peralatan rumah tangga yang diadakan	100					100	100	25

	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase realisasi Bahan Logistik yang diadakan	100				100	100	25
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah realisasi barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	100				100	100	25
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	50				50	50	12,5
	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	80				80	80	20
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	80				80	80	20
	8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah	Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terkoneksi	100				100	100	25
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah realisasi peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	30				30	30	7,5
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi	100				100	100	25
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100				100	100	25
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100				100	100	25
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100				100	100	25
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Persentase kendaraan dinas operasional atau jabatan dalam kondisi layak	100				100	100	25
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak	100				100	100	25
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	100				100	100	25
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	100				100	100	25
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase pertumbuhan nilai investasi</b>	<b>0,6</b>				<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,15</b>
		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah potensi dan peluang investasi yang tersedia	1				1	1	0,25
		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase promosi dan peluang investasi yang dipromosikan</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>

	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan promosi penanaman modal</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	1				1	1	0,25
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase ljin yang terbit tepat waktu</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah izin yang diterbitkan	800				800	800	200
	2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah usaha yang telah memenuhi komitmen	750				750	750	187,5
	3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	5				5	5	1,25
	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	jumlah usaha yang difasilitasi	50				50	50	12,5
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase pengawasan penanaman modal</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah bidang usaha (KLB)	16				16	16	4
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi PM</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase data perizinan dan penanaman modal yang dipublikasikan</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah data perizinan dan penanaman modal yang tersedia	750				750	750	187,5
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja</b>	<b>88,3</b>				<b>88,3</b>	<b>88,3</b>	<b>22,075</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya</b>	<b>244</b>				<b>244</b>	<b>244</b>	<b>61</b>
	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	144				144	144	36
	2 Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di BLK	384				384	384	96
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair</b>	<b>88,3</b>				<b>88,3</b>	<b>88,3</b>	<b>22,075</b>

	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah peserta yang terlayani pada pelayanan antar kerja</b>	<b>815</b>					<b>815</b>	<b>815</b>	<b>203,75</b>
	Pelayanan antar Kerja	jumlah pencari kerja	800					800	800	200
		Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15					15	15	3,75
	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair</b>	<b>80</b>					<b>80</b>	<b>80</b>	<b>20</b>
	Job Fair/Bursa Kerja	jumlah pencari kerja yang melamar melalui Job Market Fair (JMF)	1000					1000	1000	250
	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peserta yang terlayani pada layanan terpadu CPMI</b>	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah peserta sosialisasi AKAN	50					50	50	12,5
		Jumlah CPMI yang membuat rekam paspor	12					12	12	3
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja</b>	<b>70</b>					<b>70</b>	<b>70</b>	<b>17,5</b>
		<b>Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan</b>	<b>55</b>					<b>55</b>	<b>55</b>	<b>13,75</b>
	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja</b>	<b>70</b>					<b>70</b>	<b>70</b>	<b>17,5</b>
	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja persyaratan kerja	130					130	130	32,5
	2 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	jumlah perusahaan yang difasilitasi pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	80					80	80	20
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kasus yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama</b>	<b>77,2</b>					<b>77,2</b>	<b>77,2</b>	<b>19,3</b>
	1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka pencegahan hubungan industrial	12					12	12	3
	2 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah anggota SPSI yang diverifikasi	9					9	9	2,25
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>2.7</b>	<b>URUSAN PEMERINTAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase peningkatan kesempatan kerja</b>			<b>83,33</b>	<b>59,68</b>	<b>71,62</b>		<b>59,68</b>	<b>14,92</b>
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase peningkatan kesempatan kerja</b>			<b>83,33%</b>	<b>26,22%</b>	<b>31,47</b>		<b>0,26</b>	<b>0,06555</b>
<b>2.7.3.2.01.</b>	<b>Pelaksanaan Pelatin berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah Peserta Pelatihan Berbagai Jenis Kejuruan dan Kewirausahaan</b>			<b>244</b>	<b>64</b>	<b>26,23</b>		<b>64,00</b>	<b>16</b>

2.07.03.2.01.01	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatin Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Jumlah Peserta Pelatihan Berbagai Jenis Kejuruan dan Kewirausahaan			144	32	22,22		32,00	8
2.07.03.2.01.02	2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta dan Pra Lembaga Pelatin Kerja (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan di Balai Latihan Kerja			100	32	32,00		32,00	8
2.7.4	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase peningkatan kesempatan kerja</b>			<b>83,30</b>	<b>98,84</b>	<b>118,66</b>		<b>98,84</b>	<b>24,71</b>
2.7.4.2.01.	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Permohonan Kartu AK 1</b>			<b>650</b>	<b>498,00</b>	<b>76,62</b>		<b>498,00</b>	<b>124,5</b>
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Jumlah Permohonan Kartu AK 1			650	498	76,62		498,00	124,5
2.7.4.2.03.	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Pencari Kerja yang Melamar Melalui Job Market Fair (JMF)</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>		<b>1000</b>	<b>250</b>
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Jumlah Pencari Kerja yang Melamar Melalui Job Market Fair (JMF)			1.000	1.000	100		1000	250
2.07.04.2.04.	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Calon Pekerja Imigran Indonesia</b>			<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Jumlah Calon Pekerja Imigran Indonesia			12	0	0		0	0
2.7.5	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan</b>			<b>66,7%</b>	<b>106,4%</b>	<b>159,52</b>		<b>1,06</b>	<b>0,266</b>
2.07.05.2.01.	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang nya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>a. Persentase Perusahaan yang Memenuhi Persyaratan Kerja b. Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja</b>			<b>80%</b>	<b>95,8%</b>	<b>119,75</b>		<b>0,96</b>	<b>0,2395</b>
2.07.05.2.01.01	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase Perusahaan yang Memenuhi Persyaratan Kerja			80%	95,8%	119,75		0,96	0,2395
2.07.05.2.01.03	2 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupan (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja			120	80	66,67		80,00	20
2.07.05.2.02.	<b>pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penurunan Kasus dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</b>			<b>77,2%</b>	<b>117%</b>	<b>151,55</b>		<b>1,17</b>	<b>0,2925</b>
2.07.05.2.02.01	1 pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase Penurunan Kasus dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			77,2 %	117%	151,55		1,17	0,2925
2.07.05.2.02.03	2 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Kean pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi			12	12	100,00		12,00	3

	(DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)									
2.18	URUSAN PEMERINTAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan			1,3%	0,7%	53,85		0,01	0,00175
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%			1	1	100,00		1,00	0,25
2.18.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja kegiatan Minimal 80%			87%	90%	103,45		0,90	0,225
2.18.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan			7	6	85,71		6,00	1,5
2.18.01.2.01.06	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan			7	6	85,71		6,00	1,5
2.18.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan			100%	117%	117		1	0,2925
2.18.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu			100	75	75		75	18,75
2.18.01.2.02.03	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi			80	160	200		160	40
2.18.01.2.02.07	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			25	20	80		20	5
2.18.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan			80%	36,6%	45,75		0,37	0,0915
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan			80%	36,6%	45,75		0,37	0,0915
2.18.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan			80%	43,75%	54,69		0,44	0,109375
2.18.01.2.06.02	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			80	32	40,00		32,00	8
2.18.01.2.06.03	2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi			80	27	33,75		27,00	6,75
2.18.01.2.06.05	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi			80	52	65,00		52,00	13
2.18.01.2.06.06	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi			80	94	117,50		94,00	23,5
2.18.01.2.06.08	5 Fasilitasi Kunjungan Tamu (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi			80	15	18,75		15,00	3,75
2.18.01.2.06.09	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL,	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi			80	48	60,00		48,00	12

	PTSP, DAN TENAGA KERJA)									
2.18.01.2.06.11	7 Dukungn Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terkoneksi			80	37	46,25		37,00	9,25
2.18.01.2.07.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang terpenuhi</b>			<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Jumlah realisasi Peralatan dan Mesin Lainnya			80	0	0,00		0,00	0
2.18.01.2.08.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>persentase ketatalaksanaan tepat waktu</b>			<b>80</b>	<b>34,88%</b>	<b>0,44</b>		<b>0,35</b>	<b>0,0872</b>
2.18.01.2.08.01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi			85	38	44,71		38,00	9,5
2.18.01.2.08.02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi			87	34	39,08		34,00	8,5
2.18.01.2.08.03	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi			87	32	36,78		32,00	8
2.18.01.2.08.04	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi			87	38	43,68		38,00	9,5
2.18.01.2.09.	<b>pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang terpenuhi</b>			<b>80</b>	<b>33,17</b>	<b>41,46</b>		<b>33,17</b>	<b>8,2925</b>
2.18.01.2.09.01	1 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan atau Lapangan yang terpenuhi			80	23	28,75		23,00	5,75
2.18.01.2.09.02	2 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi			87	38	43,68		38,00	9,5
2.18.01.2.09.05	3 pemeliharaan Mebel (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase mebel yang terpelihara			87	0	0,00		0,00	0
2.18.01.2.09.06	4 pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara			80	39	48,75		39,00	9,75
2.18.01.2.09.09	5 pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara			87	0	0,00		0,00	0
2.18.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan</b>			<b>1,30</b>	<b>0,48</b>	<b>36,92</b>		<b>0,48</b>	<b>0,12</b>

2.18.2.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota			100	0	0,00		0,00	0
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota			100	0	0,00		0,00	0
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan			1,30	0,48	36,92		0,48	0,12
2.18.03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan			1	0	0,00		0,00	0
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan			1	0	0,00		0,00	0
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ijin yang terbit tepat waktu			100	69,19%	0,69		0,69	0,172975
2.18.04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	a. jumlah usaha yang telah memenuhi komitmen b. jumlah usaha yang telah difasilitasi			750	519	69,20		519,00	129,75
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan BerUsaha Terintegrasi secara Elektronik (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	jumlah izin yang terbit tepat waktu			750	256	34,13		256,00	64
2.18.04.2.01.02	Pemantauan pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	jumlah usaha yang telah memenuhi komitmen			750	263	35,07		263,00	65,75
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terdapat Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti			25	4	16,00		4,00	1
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	jumlah usaha yang telah difasilitasi			160	51	31,88		51,00	12,75
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan			1,3%	0,48%	36,92		0,00	0,0012
2.18.05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengawasan yang dilaksanakan			7	2	28,57		2,00	0,5
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	Jumlah Pembinaan yang Dilaksanakan			4	1	25,00		1,00	0,25
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	jumlah pengawasan yang dilaksanakan			3	1	33,33		1,00	0,25
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	jumlah pengawasan yang dilaksanakan			3	0	0,00		0,00	0



2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan			1,30	0,7%	0,54		0,01	0,00175
2.18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi			750	565	75,33		565,00	141,25
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan BerUsaha Terintegrasi secara Elektronik (DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA)	jumlah data perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi			750	565	75,33		565,00	141,25
1.2.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Sakip DPMPTSP		80,37					80,37	20,0925
1.2.11.01.002	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, telepon, internet yang dicukupi/terbayar		77,39					77,39	19,3475
1.2.11.01.015	2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Majalah dan surat kabar		100,00					100,00	25
1.2.11.01.018	3. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah konsultasi dan Koordinasi keluar daerah		78,57					78,57	19,6425
1.2.11.01.020	4. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terdukungnya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah/Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		80,00					80,00	20
1.2.11.01.027	5. Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah administrasi dan operasional rutin kantor yang terpenuhi		90,00					90,00	22,5
1.2.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai Sakip DPMPSTP		80,37					80,37	20,0925
1.2.11.02.010	1. Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebelair		0,00					0,00	0
1.2.11.02.013	2. Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll	Jumlah Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi yang terpenuhi		0,00					0,00	0
1.2.11.02.022	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara		0,00					0,00	0
1.2.11.02.023	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil jabatan		0,00					0,00	0
1.2.11.02.024	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		0,00					0,00	0
1.2.11.02.029	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Jumlah mebelair yang terpelihara dengan baik		0,00					0,00	0
1.2.11.02.032	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, alat studio dan alat komunikasi	Jumlah Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, alat studio dan alat komunikasi yang dipelihara		0,00					0,00	0
1.2.11.02.036	8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan bangunan lainnya	Jumlah taman yang dipelihara		0,00					0,00	0
1.2.11.02.061	9. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen penyusunan BMD		0,00					0,00	0
1.2.11.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Nilai SAKIP DPMPST		80,37					80,37	20,0925

1.2.11.03.002	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas harian		0,00					0,00	0
1.2.11.03.005	2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian hari-hari tertentu		0,00					0,00	0
1.2.11.03.006	3. Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga		0,00					0,00	0
1.2.11.03.007	4. Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo	Jumlah penyelenggaraan peringatan dan upacara hari jadi Kota Probolinggo		0,00					0,00	0
<b>1.2.11.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas SDA</b>		<b>0,00%</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.2.11.01.05.004	1. Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perrundang-undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan		0,00					0,00	0
<b>1.2.11.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP DPMPTSP</b>		<b>80,37</b>					<b>80,37</b>	<b>20,0925</b>
1.2.11.01.06.001	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan Keuangan		0,00					0,00	0
1.2.11.01.06.002	2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP		0,00					0,00	0
1.2.11.01.06.007	3. Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	Jumlah Dokumen RKA/DPA		0,00					0,00	0
1.2.11.01.06.008	4. Penyusunan Renstra	Jumlah Dokumen Renstra		0,00					0,00	0
1.2.11.01.06.029	5. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi		0,00					0,00	0
<b>1.2.11.01.07</b>	<b>Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Presentase peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik</b>		<b>0,00%</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.2.11.01.07.002	1. Perancangan, Penetapan dan Sertifikasi SMM ISO 9001-2008	Jumlah Sertifikasi SMM ISO 9001:2008 pada BPMPP		0,00					0,00	0
1.2.11.01.07.004	2. Perencanaan dan Penyusunan SOP dan SPP	Jumlah Dokumen SOP BPMPP		0,00					0,00	0
1.2.11.01.07.006	3. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM		0,00					0,00	0
1.2.11.01.07.010	4. Pengelolaan Informasi dan Data	Jumlah Informasi dan data yang memadai/Data Perijinan		0,00					0,00	0
1.2.11.01.07.020	5. Evaluasi dan Pengendalian Perijinan	Jumlah Evaluasi dan pengendalian perijinan		0,00					0,00	0
<b>1.2.11.01.08</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Presentase Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>		<b>0,00%</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.2.11.01.08.005	1. Pengembangan Budaya Kerja	Jumlah kelompok budaya kerja		0,00					0,00	0
<b>1.2.11.01.15</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Persentase Peningkatan investor</b>		<b>0,57%</b>					<b>0,01</b>	<b>0,001425</b>
1.2.11.01.15.005	1. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah dokumen inventarisasi potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan		0,00					0,00	0

1.2.11.01.15.006	2. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Perijinan dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Jumlah Rapat koordinasi	0,00					0,00	0
1.2.11.01.15.008	3. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM	0,00					0,00	0
1.2.11.01.15.010	4. Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Promosi investasi yang dilaksanakan	0,00					0,00	0
1.2.11.01.15.011	5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah movev	0,00					0,00	0
1.2.11.01.15.012	6. Operasional Penertiban Perijinan	Jumlah Penertiban perijinan di Kota Probolinggo	0,00					0,00	0
1.2.11.01.15.014	7. Penyediaan Media Penyebarluasan Informasi Perijinan	Leaflet dan Pemeliharaan Papan Reklame	0,00					0,00	0
1.2.11.01.15.017	8. Sosialisasi Tentang Perijinan Kepada Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Tentang Perizinan	0,00					0,00	0
1.2.11.01.15.019	9. Pengembangan aplikasi pelayanan perizinan	Jumlah Aplikasi pelayanan perijinan	0,00					0,00	0
1.2.11.01.15.020	10. Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Rapat Pengaduan Disertai Tinjau Lokasi	0,00					0,00	0
<b>1.2.11.01.16</b>	<b>Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Persentase peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</b>	<b>0,00%</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.16.1.16.16.002	1. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Jumlah Fasilitas di bidang investasi	0,00					0,00	0
<b>1.2.11.01.19</b>	<b>Program Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan UMKM</b>	<b>Persentase peningkatan investasi dari izin yang diterbitkan</b>	<b>0,00%</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.2.11.01.19.002	1. Promosi Potensi-Potensi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Investasi dan Daya Tarik Penanaman Modal	Jumlah Promosi potensi investasi dalam daerah	0,00					0,00	0
1.2.11.01.19.003	2. Pembuatan Profil Investasi	Jumlah Leaflet, video dan buku profil investas	0,00					0,00	0
<b>1.2.11.01.22</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Nilai SAKIP DPMPSTP</b>	<b>80,37</b>					<b>80,37</b>	<b>20,0925</b>
1.2.11.01.22.001	1. Perancangan, Penetapan dan Sertifikasi SMM ISO	Jumlah Pelayanan yang Ber SMM ISO 9001:2015	0,00					0,00	0
1.2.11.01.22.002	2. Perencanaan dan Penyusunan Prosedur Operasi Standar/Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah SOP DPMPSTP	0,00					0,00	0
1.2.11.01.22.003	3. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen IKM	0,00					0,00	0
1.2.11.01.22.004	4. Penyusunan SPP	Jumlah Dokumen SPP yang sesuai dengan aturan berlaku	0,00					0,00	0
<b>1.2.11.01.23</b>	<b>Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Dalam Rangka Peningkatan Investasi</b>	<b>Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu</b>	<b>304,13%</b>					<b>3,04</b>	<b>0,760325</b>
1.2.11.01.23.004	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah Pemeliharaan Software SIPADU	0,00					0,00	0
1.2.11.01.23.006	2. Koordinasi Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan	Peserta Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan	0,00					0,00	0

1.2.11.01.23.007	3.	Koordinasi Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa	Peserta Rapat Koordinasi Bidang Perdagangan dan Jasa	0,00				0,00	0
1.2.11.01.23.008	4.	Koordinasi Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan	Peserta Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan	0,00				0,00	0
1.2.11.01.23.009	5.	Evaluasi dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan	Peserta Evaluasi dan pengendalian perizinan bidang Pembangunan	0,00				0,00	0
1.2.11.01.23.010	6.	Evaluasi dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa	Peserta Evaluasi dan pengendalian perizinan bidang Perdagangan dan Jasa	0,00				0,00	0
1.2.11.01.23.011	7.	Evaluasi dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan	Peserta Evaluasi dan pengendalian perizinan bidang kesehata	0,00				0,00	0
1.2.11.01.23.012	8.	Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Bidang Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan survey perizinan dan non perizina	0,00				0,00	0
1.2.11.01.23.013	9.	Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Bidang Perdagangan dan Jasa	Jumlah Pelaksanaan survey perizinan dan non perizinan bidang perdagangan dan ja	0,00				0,00	0
1.2.11.01.23.014	10.	Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Bidang Kesehatan	Jumlah Pelaksanaan survey perizinan dan non perizinan bidang kesehatan	0,00				0,00	0
1.2.11.01.23.015	11.	Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan	Jumlah Kertas izin, map izin, plat IMB, map plastik, papan fasum, plat HO	0,00				0,00	0
1.2.11.01.23.016	12.	Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa	Jumlah Map izin, kertas izin, stiker reklame, plat makam	0,00				0,00	0
1.2.11.01.23.017	13.	Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan	Jumlah Kertas izin, map izin, map plastik	0,00				0,00	0
12.11.23.018	14.	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan Tepat Waktu	149,07%				1,49	0,372675
12.11.23.019	15.	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa Tepat Waktu	16,69%				0,17	0,041725
12.11.23.020	16.	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan Tepat Waktu	141,15%				1,41	0,352875
<b>1.2.11.01.24</b>		<b>Program Peningkatan Pelaksanaan Pendataan Informasi Pelaporan Bidang Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan</b>	<b>Persentase data perizinan dan investasi yang terhimpun dan diinformasikan</b>	<b>186,40%</b>				<b>1,86</b>	<b>0,466</b>
1.2.11.01.24.001	1.	Monitoring Evaluasi Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah Pelaksanaan Monev	6				6,00	1,5
1.2.11.01.24.002	2.	Pengelolaan Data Perijinan dan Penanaman Modal	Jmlah Data perijinan dan Penanaman Modal yang terhimpun dengan baik	64				64,00	16
1.2.11.01.24.003	3.	Penyediaan Media Penyebarluasan Informasi Perijinan	Jumlah Penyebarluasan informasi perijinan dan penanaman modal	0,00				0,00	0
1.2.11.01.24.004	4.	Sosialisasi Tentang Perijinan Kepada Masyarakat	Peserta sosialisasi tentang perijinan	0,00				0,00	0
<b>1.2.11.01.25</b>		<b>Program Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>Persentase perusahaan yang tertib izin/ketentuan penanaman modal</b>	<b>151%</b>				<b>1,51</b>	<b>0,3775</b>
1.2.11.01.25.001	1.	Penanganan Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	6				6,00	1,5
1.2.11.01.25.002	2.	Sosialisasi Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal	Peserta sosialisasi pelaksanaan ketentuan penanaman moda	0,00				0,00	0
1.2.11.01.25.003	3.	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kumulatif Penanaman Modal (LKPM)	2,00				2,00	0,5
1.2.11.01.25.004	4.	Sosialisasi Penanganan Pengaduan	Jumlah Sosialisasi penanganan pengaduan	0,00				0,00	0

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Pada Tahun 2021 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tanga Kerja sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 183 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Adapun hasil analisis capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**  
**Kota Probolinggo**

No.	Indikator (IKU OPD)	SPM / standar nasional (bila ada)	IKK (bila ada)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal			0,37 %	0,38 %	0,39 %	0,4%	2%	0,37%	0,38 %	0,39 %	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat			82,25%	82,50%	82,75%	83,40%	82,25%	82,39%	82,75%	83,40 <sup>^</sup>	
3.	Persentase Pencari kerja yang Ditempatkan Pada Sektor Formal dan Informal			75,4 %	83,3 %	88,3%	93,3%	80%	83,3%	83,3 %	88,3%	
4.	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja			64,5%	80%	70%	70%	52%	50%	70%	70%	
5.	Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Anjuran dan Perjanjian Bersama			61,4 %	62,3 %	63,2%	63,3%	100%	67%	62,3 %	63,2%	

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

Isu-isu strategis atau kondisi harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat.

## **PERMASALAHAN & ISU – ISU STRATEGIS :**

### **Urusan Penanaman Modal**

1. Potensi dan peluang potensi penanaman modal belum terinventarisasi secara lengkap dan komunikatif. Faktor faktor yang mempengaruhi diantaranya :
  - a. Data potensi masih kurang lengkap. Pada aplikasi OSS belum mengakomodir Izin Usaha Mikro, sehingga nilai investasi dari sektor mikro belum dapat dihitung secara otomatis;
  - b. Belum adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang metode penentuan potensi peluang penanaman modal;
  - c. Belum adanya prospectus investasi.
2. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan masih banyak kendala dalam proses penyelesaiannya. Faktor faktor yang mempengaruhi diantaranya :
  - a. Lambatnya pertimbangan teknis dari dinas teknis terkait;
  - b. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam proses penyelesaian IMB baik dalam hal cek lokasi lapangan, penerbitan izin dan petugas yang memahami teknis (SDM belum tersertifikasi).
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi perizinan online. Faktor faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah Sumber Daya Manusia yang belum siap dalam melaksanakan teknologi informasi;
4. Pelaksanaan penomoran perizinan online melalui SI CANTIK CLOUD masih terkendala;
5. NSPK pada aplikasi OSS masing – masing kementerian sering berubah;
6. Fasilitas sarana dan prasarana di MPP belum lengkap (Help Desk, Telepon antar Counter, Wi – Fi)

### **Urusan Tenaga Kerja**

1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Faktor – faktor yang mempengaruhi diantaranya :
  - a. Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah dan masih mengandalkan sektor formal;
  - b. Rendahnya kesadaran calon tenaga kerja dalam meningkatkan kemampuan, kompetensi dan keterampilan diri dalam persaingan dunia kerja.
2. Kualitas pelatihan umumnya masih rendah dikarenakan kurangnya tenaga instruktur serta program pelatihan pada umumnya tidak menjamin penempatan;
3. Perusahaan yang menerapkan UMK jumlahnya masih sedikit dikarenakan banyak perusahaan yang menyatakan kurang mampu menerapkan UMK dan tidak ada sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK;
4. Kesadaran pengusaha untuk patuh terhadap aturan ketenagakerjaan masih rendah. Hal ini dikarenakan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja tidak

mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi, peran Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja hanya melakukan fungsi pembinaan;

5. Masih terdapat kasus perselisihan hubungan industrial tiap tahunnya. Factor – factor yang mempengaruhi diantaranya :

- a. Pemahaman peraturan ketenagakerjaan oleh pekerja masih kurang;
- b. Kurangnya monitoring dan evaluasi pasca pembinaan dan kunjungan tim deteksi dini oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2021, Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo menetapkan program prioritas sebagai berikut :

**Tabel T-C.31.**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022**  
**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan 2022	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan 2022	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Non Urusan</b>											
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100	9.708.315.231,00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100	9.708.315.231,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100	50.103.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100	50.103.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	10	34.073.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	10	34.073.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	10	16.030.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	10	16.030.000,00	



	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>8.411.718.453,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>8.411.718.453,00</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100	8.277.358.453,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100	8.277.358.453,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	100	126.794.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	100	126.794.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100	7.566.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100	7.566.000,00	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>24.048.000,00</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>24.048.000,00</b>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	20	24.048.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	20	24.048.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>3.750.000,00</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Probolinggo	Jumlah Realisasi Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Yang Diadakan	200	3.750.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Probolinggo	Jumlah Realisasi Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Yang Diadakan	200	3.750.000	

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>235.870.278,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>235.870.278,00</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100	35.813.450,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100	35.813.450,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi peralatan rumah tangga yang diadakan	100	1.355.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi peralatan rumah tangga yang diadakan	100	1.355.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Probolinggo	Persentase realisasi Bahan Logistik yang diadakan	100	9.999.400,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Probolinggo	Persentase realisasi Bahan Logistik yang diadakan	100	9.999.400,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	100	2.868.428,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	100	2.868.428,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	70	1.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	70	1.500.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	90	4.500.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	90	4.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	90	99.834.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	90	99.834.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terkoneksi	100	80.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terkoneksi	100	80.000.000,00	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>1.500.000,00</b>	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	40	1.500.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah realisasi peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	40	1.500.000,00	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>852.070.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>852.070.000,00</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolinggo	Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi	100	70.158.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolinggo	Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi	100	70.158.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100	420.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100	420.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100	120.880.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100	120.880.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100	241.032.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100	241.032.000,00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>129.255.500,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>129.255.500,00</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Kota Probolinggo	Persentase kendaraan dinas operasional atau jabatan dalam kondisi layak	100	36.625.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Kota Probolinggo	Persentase kendaraan dinas operasional atau jabatan dalam kondisi layak	100	36.625.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Probolinggo	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak	100	51.753.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Probolinggo	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak	100	51.753.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	100	30.877.500,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	100	30.877.500,00	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	100	10.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	100	10.000.000,00	
	<i>Urusan</i>										
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Kota Probolinggo	Persentase pertumbuhan nilai investasi	0,8	55.600.000,00	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Kota Probolinggo	Persentase pertumbuhan nilai investasi	0,8	55.600.000,00	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota	100	55.600.000,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota	100	55.600.000,00	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah potensi dan peluang investasi yang tersedia	1	55.600.000,00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah potensi dan peluang investasi yang tersedia	1	55.600.000,00	
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Kota Probolinggo	Persentase promosi dan peluang investasi yang dipromosikan	100	34.335.000,00	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Kota Probolinggo	Persentase promosi dan peluang investasi yang dipromosikan	100	34.335.000,00	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase peningkatan promosi penanaman modal	100	34.335.000,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase peningkatan promosi penanaman modal	100	34.335.000,00	
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Kota Probolinggo	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	1	34.335.000,00	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Kota Probolinggo	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	1	34.335.000,00	
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kota Probolinggo	Persentase Ijin yang terbit tepat waktu	100	247.141.000,00	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kota Probolinggo	Persentase Ijin yang terbit tepat waktu	100	247.141.000,00	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Probolinggo	Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	100	247.141.000,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Probolinggo	Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	100	247.141.000,00	

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Probolinggo	jumlah izin yang diterbitkan	850	108.318.000,00	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Probolinggo	jumlah izin yang diterbitkan	850	108.318.000,00	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Probolinggo	jumlah usaha yang telah memenuhi komitmen	750	71.574.000,00	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Probolinggo	jumlah usaha yang telah memenuhi komitmen	750	71.574.000,00	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Probolinggo	jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	10	3.250.000,00	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Probolinggo	jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	10	3.250.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Probolinggo	jumlah usaha yang difasilitasi	50	63.999.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Probolinggo	jumlah usaha yang difasilitasi	50	63.999.000,00	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>35.000.000,00</b>	
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>persentase pengawasan penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>persentase pengawasan penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>35.000.000,00</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Probolinggo	jumlah bidang usaha (KLBI)	16	35.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Probolinggo	jumlah bidang usaha (KLBI)	16	35.000.000,00	

	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kota Probolinggo	Persentase ketersediaan data dan informasi PM	100	44.068.500,00	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kota Probolinggo	Persentase ketersediaan data dan informasi PM	100	44.068.500,00	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	persentase data perizinan dan penanaman modal yang dipublikasikan	100	44.068.500,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	persentase data perizinan dan penanaman modal yang dipublikasikan	100	44.068.500,00	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Probolinggo	jumlah data perizinan dan penanaman modal yang tersedia	750	44.068.500,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Probolinggo	jumlah data perizinan dan penanaman modal yang tersedia	750	44.068.500,00	
	<i>Urusan</i>										
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA</b>	Kota Probolinggo	Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	99,3	281.314.300,00	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA</b>	Kota Probolinggo	Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	99,3	281.314.300,00	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Probolinggo	Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya	244	281.314.300,00	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Probolinggo	Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya	244	281.314.300,00	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Probolinggo	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	144	173.615.650,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Probolinggo	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	144	173.615.650,00	
	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kota Probolinggo	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di BLK	384	107.698.650,00	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kota Probolinggo	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di BLK	384	107.698.650,00	

	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Kota Probolinggo	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	99,3	121.437.750,00	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Kota Probolinggo	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	99,3	121.437.750,00	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah peserta yang terlayani pada pelayanan antar kerja	825	81.438.000,00	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah peserta yang terlayani pada pelayanan antar kerja	825	81.438.000,00	
	Pelayanan antar Kerja	Kota Probolinggo	jumlah pencari kerja	800	81.438.000,00	Pelayanan antar Kerja	Kota Probolinggo	jumlah pencari kerja	800	81.438.000,00	
		Kota Probolinggo	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	25			Kota Probolinggo	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	25		
	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Kota Probolinggo	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	80	35.000.000,00	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Kota Probolinggo	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	80	35.000.000,00	
	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Probolinggo	jumlah pencari kerja yang melamar melalui Job Market Fair (JMF)	1000	35.000.000,00	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Probolinggo	jumlah pencari kerja yang melamar melalui Job Market Fair (JMF)	1000	35.000.000,00	
	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	Persentase peserta yang terlayani pada layanan terpadu CPMI	100	4.999.750,00	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	Persentase peserta yang terlayani pada layanan terpadu CPMI	100	4.999.750,00	
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kota Probolinggo	Jumlah peserta sosialisasi AKAN	50	4.999.750,00	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kota Probolinggo	Jumlah peserta sosialisasi AKAN	50	4.999.750,00	
		Kota Probolinggo	Jumlah CPMI yang membuat rekom paspor	12			Kota Probolinggo	Jumlah CPMI yang membuat rekom paspor	12		
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Kota Probolinggo	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70	135.401.500,00	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Kota Probolinggo	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70	135.401.500,00	
			Persentase Penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	55				Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	55		

	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitas pemenuhan persyaratan kerja</b>	<b>90</b>	<b>39.759.500,00</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitas pemenuhan persyaratan kerja</b>	<b>90</b>	<b>39.759.500,00</b>	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Probolinggo	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pemenuhan persyaratan kerja persyaratan kerja	130	9.759.500,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Probolinggo	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pemenuhan persyaratan kerja persyaratan kerja	130	9.759.500,00	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Probolinggo	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pemenuhan persyaratan kerja persyaratan kerja	80	30.000.000,00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Probolinggo	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pemenuhan persyaratan kerja persyaratan kerja	80	30.000.000,00	
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase kasus yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama</b>	<b>77,2</b>	<b>95.642.000,00</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase kasus yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama</b>	<b>77,2</b>	<b>95.642.000,00</b>	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka pencegahan hubungan industrial	17	45.642.000,00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka pencegahan hubungan industrial	17	45.642.000,00	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Probolinggo	Jumlah anggota SPSI yang diverifikasi	9	50.000.000,00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Probolinggo	Jumlah anggota SPSI yang diverifikasi	9	50.000.000,00	





## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahun 2022 Walikota Probolinggo mempunyai tema pembangunan yaitu AKSELERASI PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA KOTA PROBOLINGGO YANG BERDAYA SAING.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo mengampu 3 (tiga) Misi Pembangunan Kota Probolinggo yaitu :

1. Pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial;
2. Sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas;
3. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Dinas Penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam mendukung

Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Prioritas Pembangunan Kota	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Uraian Kegiatan
1	Ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM untuk mendorong Pemulihan Ekonomi sektor pariwisata, industri dan investasi	Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan kebijakan Investasi	Program Peningkatan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemetaan peluang potensi investasi</li> <li>- Meningkatkan pemantauan kinerja penanaman modal</li> <li>- Meningkatkan promosi investasi</li> <li>- Meningkatkan penyebaran informasi penanaman modal</li> </ul>
2	Peningkatan kualitas, produktifitas dan daya saing SDM	Meningkatkan produktivitas dan penempatan tenaga kerja didukung hubungan industrial yang kondusif	penempatan, perluasan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pelatihan kerja yang banyak tepat</li> <li>- Mengadakan MOU dengan BLK dan LPK swasta,</li> <li>- Mengoptimalkan kerjasama dengan perusahaan terkait permintaan lowongan kerja</li> <li>- pendampingan masalah ketegakerjaan/hubungan industrial</li> </ul>
3	Peningkatan Ketertiban umum, tata kelola pemerintahan dan kualitas	Meningkatkan manajemen dan SDM pelayanan publik	peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan fasilitas pelayanan pada sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik</li> <li>- Mengoptimalkan pelaksanaan perizinan online (pengoptimalan SI CANTIK CLOUD)</li> <li>- Memberikan pendampingan OSS</li> </ul>

Selain program dan kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo untuk perencanaan pembangunan juga mengakomodir usulan program kegiatan yang berasal dari bawah / masyarakat (bottom up).

**Tabel T-C.32**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo**

No.	Program/Kegiatan Tahun 2022	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
2.18.0 1	Urusan Penanaman Modal		Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	
2.07.0 3	Urusan Ketenagakerjaan		Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	
1	Pelatihan Kopi Barista Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat	PEMUDA RW 05 JL MUSI, Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	16 Peserta
2	Pelatihan Barbershop Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat	PEMUDA RW 04, Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	16 Peserta
3	Pelatihan Jahit Sandal Hotel Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat	PEMUDA RW 01, Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	16 Peserta
4	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Walikota Gatot RT.004 RW. 005, Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
5	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Prof Dr. Hamka 77 RT. 003 RW.005, Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
6	Pelatihan Las Listrik Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat	Dusun Krajan RT.03 RW.05, Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	16 Peserta
7	Pelatihan Barbershop Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat	Dusun Krajan RT.04 RW.05, Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	16 Peserta
8	Pelatihan Kopi Barista Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat	Dusun Krajan RT.04 RW.05, Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	16 Peserta
9	Pelatihan Otomotif roda dua Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat	Dusun Melati RT.02 RW.01, Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	16 Peserta
10	Pelatihan Barbershop Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat	Jl. SUnan AMpel RW 09 RT 02, Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	16 Peserta
11	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Dusun Krajan RT.005 RW.002, Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
12	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Perum STI RE.2 No.20 RT. 003 RW. 007, Kota Probolinggo, Wonoasih, Wonoasih, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
13	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Wilis No.29 RT/004 RW.002, Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha

14	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Mayjen Haryono X/36 A RT. 008 RW.003, Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
15	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Mastrip GG.II RT.003 RW. 013, Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
16	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Imam Bonjol 39 RT. 004 RW.005, Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
17	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Dusun Sumber RT. 002 RW. 005, Kota Probolinggo, Kedopak, Kedopak, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
18	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Letjend Sutoyo GG. V RT. 006 RW. 003, Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
19	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. KH. Hasan Gg. Hijrah RT. 002 RW, 003, Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
20	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Sunan Drajad RT. 001 RW.003, Kota Probolinggo, Wonoasih, Wonoasih, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
21	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Sunan Ampel RT. 003 RW. 007, Kota Probolinggo, Kedopak, Kedopak, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
22	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Lingkungan Esan RT.007 RW. 001, Kota Probolinggo, Wonoasih, Wonoasih, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha
23	Bantuan peralatan bagi peserta UMSI (BANSOS)	Jl. Kapten Patimura 3/77 RT. 011 RW. 009, Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	15 embrio usaha

## Bab - III

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

#### 3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan propinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kota Probolinggo. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional, maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Timur 2005–2025, RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025, RPJMD Perubahan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, dan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2022.

1. Berdasarkan sasaran Renstra Perangkat Daerah **“meningkatnya realisasi investasi dengan arah kebijakan”** dengan arah kebijakan :
  - ❖ Pengembangan Mal Pelayanan Publik yang mendukung kemudahan perizinan
  - ❖ Mengoptimalkan system OSS (Online Single Submission)
  - ❖ Menjaga iklim investasi daerah
2. Berdasarkan sasaran Renstra Perangkat Daerah **“meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah ”** dengan arah kebijakan:
  - ❖ Mengembangkan e-gov dalam segala lini bidang perangkat daerah
  - ❖ Meningkatkan pelayanan public melalui memonitoring SOP dan Standar Pelayanan yang berkualitas
  - ❖ Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang pelayanan public yang berbasis e-gov dan mempermudah akses untuk masyarakat
3. Berdasarkan sasaran Renstra Perangkat Daerah **“meningkatnya kualitas penyerapan tenaga kerja ”** dengan arah kebijakan:
  - ❖ Memperkuat program Jaminan Sosial bidang ketenagakerjaan
  - ❖ Menjamin proporsi upah yang proporsional dan tepat sasaran
  - ❖ Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas perlindungan dan keselamatan tenaga kerja
  - ❖ Meningkatkan kepesertaan program Jaminan Sosial
  - ❖ Meningkatkan cakupan serapan tenaga kerja pada sector – sector lain secara merata

- ❖ Mengoptimalkan laju pertumbuhan PDB perkapita tenaga kerja untuk efektifitas pembangunan
- ❖ Memberikan pelatihan untuk peningkatan skill terhadap sektor strategis dan potensial melalui balai latihan kerja

## **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

### **3.2.1 TUJUAN**

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, perlu dirumuskan beberapa tujuan dalam jangkauan waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan asumsi bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tetap konsisten dengan tujuan yang dikembangkan dalam periode tersebut. Tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yaitu :

- a. Meningkatnya nilai investasi daerah;
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public pemerintahan;
- c. Meningkatnya kualitas penyerapan tenaga kerja.

Penetapan tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kota Probolinggo pada umumnya didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2019 - 2024 dan mengarahkan perumusan sasaran, program dan kegiatan.

### **3.2.2 SASARAN**

Sasaran strategis adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam kurun waktu satu tahun.

Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam Sasaran dirancang pula **Indikator Pencapaian Sasaran**, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta berdasarkan arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang akan

diwujudkan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir ( 2019 - 2024 ), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan peluang investasi daerah;
- b. Penigkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Meningkatnya penempatan tenaga kerja pada sector formal dan informal;
- d. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja.

## **Bab - IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

---

### **4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019- 2024, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah

RPJMD dijabarkan oleh OPD dalam Renstra OPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke OPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan OPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra OPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, sebagaimana tabel T-C.33.

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo merumuskan 2 (dua) urusan, 9 (sembilan) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan. Total keseluruhan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 10.662.613.281, dengan sumber dana dari DAU dan Dana Hibah dan Bansos.

#### **4.2. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022**

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 dan perkiraan maju Tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut :



Tabel T-C.33

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

## dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : DPMPSTPNAKER KOTA PROBOLINGGO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
	Tahun 2022	tahun 2022	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Non Urusan</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>9.708.315.231,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>32.229.835,00</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>50.103.000,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>22,00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Kota Probolinggo	10	34.073.000,00	DAU		10	11,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Kota Probolinggo	10	16.030.000,00	DAU		10	11,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>8.411.718.453,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>330,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Kota Probolinggo	100	8.277.358.453,00	DAU		100	110,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	Kota Probolinggo	100	126.794.000,00	DAU		100	110,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Kota Probolinggo	100	7.566.000,00	DAU		100	110,00
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>24.048.000,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>26.452.800,00</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Kota Probolinggo	20	24.048.000	DAU		20	22,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>3.750.000,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>4.125.000,00</b>

			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Realisasi Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Yang Diadakan	Kota Probolinggo	200	3.750.000	DAU		200	220,00
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>235.870.278,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>803,00</b>
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kota Probolinggo	100	35.813.450,00	DAU		100	110,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah realisasi peralatan rumah tangga yang diadakan	Kota Probolinggo	100	1.355.000,00	DAU		100	110,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase realisasi Bahan Logistik yang diadakan	Kota Probolinggo	100	9.999.400,00	DAU		100	110,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah realisasi barang cetak dan penggandaan yang diadakan	Kota Probolinggo	100	2.868.428,00	DAU		100	110,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	Kota Probolinggo	50	1.500.000,00	DAU		60	66,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	Kota Probolinggo	80	4.500.000,00	DAU		85	93,50
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Probolinggo	80	99.834.000,00	DAU		85	93,50
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah	Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terkoneksi	Kota Probolinggo	100	80.000.000,00	DAU		100	110,00
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>1.500.000,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>1.650.000,00</b>
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah realisasi peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kota Probolinggo	30	1.500.000,00	DAU		35	38,50
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>852.070.000,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>440,00</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi	Kota Probolinggo	100	70.158.000,00	DAU		100	110,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Kota Probolinggo	100	420.000.000,00	DAU		100	110,00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	Kota Probolinggo	100	120.880.000,00	DAU		100	110,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Kota Probolinggo	100	241.032.000,00	DAU		100	110,00
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>129.255.500,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>440,00</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Persentase kendaraan dinas operasional atau jabatan dalam kondisi layak	Kota Probolinggo	100	36.625.000,00	DAU		100	110,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak	Kota Probolinggo	100	51.753.000,00	DAU		100	110,00

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	Kota Probolinggo	100	30.877.500,00	DAU		100	110,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	Kota Probolinggo	100	10.000.000,00	DAU		100	110,00
<b>Urusan Penanaman Modal</b>											
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase pertumbuhan nilai investasi</b>	Kota Probolinggo	<b>0,6</b>	<b>55.600.000,00</b>	DAU		<b>0.7</b>	<b>61.160.000,00</b>
			<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>55.600.000,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>61.160.000,00</b>
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah potensi dan peluang investasi yang tersedia	Kota Probolinggo	1	55.600.000,00	DAU		1	1,10
			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase promosi dan peluang investasi yang dipromosikan</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>34.335.000,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>37.768.500,00</b>
			<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan promosi penanaman modal</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>34.335.000,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>37.768.500,00</b>
			Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	Kota Probolinggo	1	34.335.000,00	DAU		1	1,10
			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Ijin yang terbit tepat waktu</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>247.141.000,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>271.855.100,00</b>
			<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>247.141.000,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>1.822,70</b>
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah izin yang diterbitkan	Kota Probolinggo	800	108.318.000,00	DAU		850	935,00
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah usaha yang telah memenuhi komitmen	Kota Probolinggo	750	71.574.000,00	DAU		750	825,00
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Kota Probolinggo	5	3.250.000,00	DAU		7	7,70
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	jumlah usaha yang difasilitasi	Kota Probolinggo	50	63.999.000,00	DAU		50	55,00
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>35.000.000,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>38.500.000,00</b>
			<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase pengawasan penanaman modal</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>35.000.000,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>38.500.000,00</b>
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah bidang usaha (KLBI)	Kota Probolinggo	16	35.000.000,00	DAU		16	17,60

			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi PM</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>44.068.500,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>48.475.350,00</b>
			<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase data perizinan dan penanaman modal yang dipublikasikan</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>44.068.500,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>48.475.350,00</b>
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah data perizinan dan penanaman modal yang tersedia	Kota Probolinggo	750	44.068.500,00	DAU		750	825,00
<b>Urusan Ketenagakerjaan</b>											
			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja</b>	Kota Probolinggo	<b>88,3</b>	<b>281.314.300,00</b>	DAU		<b>99,3</b>	<b>309.445.730,00</b>
			<b>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya</b>	Kota Probolinggo	<b>244</b>	<b>281.314.300,00</b>	DAU		<b>244</b>	<b>580,80</b>
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan	Kota Probolinggo	144	173.615.650,00	DAU		144	158,40
			Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di BLK	Kota Probolinggo	384	107.698.650,00	DAU		384	422,40
			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair</b>	Kota Probolinggo	<b>88,3</b>	<b>121.437.750,00</b>	DAU		<b>99,3</b>	<b>133.581.525,00</b>
			<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah peserta yang terlayani pada pelayanan antar kerja</b>	Kota Probolinggo	<b>815</b>	<b>81.438.000,00</b>	DAU		<b>820</b>	<b>89.581.800,00</b>
			Pelayanan antar Kerja	jumlah pencari kerja	Kota Probolinggo	800	81.438.000,00	DAU		800	880,00
				Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha	Kota Probolinggo	15		DAU		20	
			<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair</b>	Kota Probolinggo	<b>80</b>	<b>35.000.000,00</b>	DAU		<b>80</b>	<b>38.500.000,00</b>
			Job Fair/Bursa Kerja	jumlah pencari kerja yang melamar melalui Job Market Fair (JMF)	Kota Probolinggo	1000	35.000.000,00	DAU		1000	1.100,00
			<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peserta yang terlayani pada layanan terpadu CPMI</b>	Kota Probolinggo	<b>100</b>	<b>4.999.750,00</b>	DAU		<b>100</b>	<b>5.499.725,00</b>
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah peserta sosialisasi AKAN	Kota Probolinggo	50	4.999.750,00	DAU		50	55,00
				Jumlah CPMI yang membuat rekom paspor	Kota Probolinggo	12				12	
			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja</b>	Kota Probolinggo	<b>70</b>	<b>135.401.500,00</b>	DAU		<b>70</b>	

				<b>Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial</b>		<b>55</b>				<b>55</b>	<b>191,40</b>
			<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja</b>	Kota Probolinggo	<b>70</b>	<b>39.759.500,00</b>	DAU		<b>70</b>	<b>165,00</b>
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	Kota Probolinggo	130	9.759.500,00	DAU		130	99,00
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	jumlah perusahaan yang difasilitasi pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Kota Probolinggo	80	30.000.000,00	DAU		80	66,00
			<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kasus yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama</b>	Kota Probolinggo	<b>77,2</b>	<b>95.642.000,00</b>	DAU		<b>77,2</b>	<b>26,40</b>
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka pencegahan hubungan industrial	Kota Probolinggo	12	45.642.000,00	DAU		15	16,50
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah anggota SPSI yang diverifikasi	Kota Probolinggo	9	50.000.000,00	DAU		9	9,90

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 merupakan landasan fundamental dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisah dalam tahapan penyusunan RAPBD. Selain itu Rencana Kinerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Kota Probolinggo Tahun 2022 merupakan pengendali dan pengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tahun lalu dan sebagai acuan untuk kegiatan yang akan datang.

Undang-undang jangka Panjang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo harus selalu menjaga kualitas kinerja, karena hal tersebut akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah di Kota Probolinggo. Dengan terselesainya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Kota Probolinggo Tahun 2022 ini semoga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Probolinggo.